



**PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HIDRAN UMUM:
*Studi Kasus Pada Pengelolaan Hidran Umum di Kota Padang***

Rian Hidayat

Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Kampus Unand Limau Manis, Padang, Sumatera Barat
Email: rianpiliang@yahoo.com

submitted: 2016.09.29 reviewed: 2016.11.02 accepted: 2016.11.29
<http://dx.doi.org/10.22202/economica.2016.v5.i1.1070>

Abstrak

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat miskin di Kota Padang adalah dengan penyediaan air bersih melalui hidran umum. Model penyediaan yang dikembangkan adalah Community-Public Partnership, dimana infrastruktur disediakan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan kemudian diserahkan kepada PDAM Kota Padang untuk mensuplai air bersihnya, sedangkan pengelolaan dan pemeliharannya diserahkan kepada masyarakat miskin secara berkelompok sebagai pengguna. Model ini sudah dikembangkan di Kota Padang sejak tahun 1974. Data Tahun 2006 menggambarkan tentang penggunaan hidran umum di Kota Padang yaitu 287 unit (52,6%) masih berfungsi dan 259 unit (47,4%) sudah tidak berfungsi. Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas yang dibangun pemerintah tidak dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga tujuan utama pemerintah untuk meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap air bersih tidak tercapai. Dalam paper ini saya mengurai permasalahan pengelolaan air bersih melalui hidran umum untuk masyarakat miskin di Kota Padang dan pada akhir tulisan ini saya menyumbangkan gagasan penguatan dan pengembangan kelembagaan lokal dalam pengelolaan air bersih hidran umum di Kota Padang.

Abstract

One of the government's efforts to provide clean water to poor communities in the Padang City is providing clean water through public hydrants. The provision of clean water is done on Community-Public Partnership Model, the infrastructure provided by the Department of Public Works and given to PDAM Padang to supply clean water, while management and maintenance given to poor communities in groups as users. This model has been developed in the Padang City since 1974. Based on the data in 2006, public hydrants in the Padang City is 287 units (52.6%) are still functioning and 259 units (47.4%) was not functioning. This indicates that the facility which has been built by the government can not be utilized properly, and the main purpose of the government to increase poor households access to clean water is not reached. This paper describes the problem of water management in the public hydrants for the poor communities in the Padang City, and the end of this paper are given ideas for strengthening and development of local institutions in the management of public water hydrants in the Padang City.

Keywords: poor communities, clean water, public hydrants

PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sehari-hari dan air memiliki peranan penting untuk mendukung kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tersedianya air yang memadai akan mendorong perkembangan sektor pembangunan di masyarakat. Program penyediaan air yang dilakukan oleh PDAM baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat untuk mendapatkan air bersih yang sehat dan memadai untuk keperluan rumah tangga maupun industri sehingga menunjang perkembangan ekonomi dan derajat kesehatan penduduk.

Pada daerah perkotaan, khususnya Kota Padang sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatra Barat yang sedang berkembang, juga dihadapkan pada kendala penyediaan air bersih dimana tuntutan dari perkembangan penduduk dan bertambahnya pemukiman baru. Tuntutan tersebut juga diharapkan diiringi dengan kebijakan pelayanan air bersih untuk penduduk miskin, karena angka kemiskinan Kota Padang pada tahun 2008 yang mencapai 23,06 persen atau 185.154 jiwa dari total penduduk sekitar 819.740 jiwa (www.padang.go.id, 2008).

Menurut data nasional, pelayanan pada sektor air minum, dimana cakupan pelayanan air minum terhadap masyarakat masih pada tingkat persentase yang rendah terutama masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin dan wilayah rendah akses atau yang tidak terjangkau secara geografis. Oleh karena itu, pelayanan air minum harus terdistribusi secara adil dan merata baik secara kewilayahan, maupun juga

diantara masyarakat yang kaya dan miskin (Bappenas, 2004).

Salah satu bentuk perhatian pemerintah pada sektor air bersih untuk penduduk miskin di Kota Padang adalah dengan memberikan pelayanan terhadap masyarakat miskin dengan penyediaan air bersih melalui infrastruktur hidran umum. Model yang dikembangkan pemerintah selama ini *community-public partnership*. Penentuan masyarakat pengguna dan pengelola serta infrastruktur disediakan dan dibangun oleh pemerintah atau Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya, kemudian diserahkan kepada pihak PDAM Kota Padang untuk *supply* air bersih, sedangkan masyarakat secara berkelompok menggunakan air bersih tersebut dan bertanggungjawab dalam mengelola dan memelihara infrastrukturnya.

Model ini pada dasarnya sudah dilakukan oleh kebanyakan PDAM melalui mekanisme hidran umum. Model ini cukup membantu bagi kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan air bersih, tapi dalam kenyataannya model ini hanya membantu masyarakat dalam waktu jangka pendek saja, dan banyak hidran umum yang diputus atau tidak beroperasi setelah beberapa tahun berjalan. Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas yang dibangun pemerintah dengan bekerja sama dengan PDAM tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga tujuan utama pemerintah untuk meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap air bersih tidak tercapai.

Hubungan pengelola sarana hidran umum dengan PDAM Kota Padang selama ini hanya sebatas transaksi pembayaran tagihan air yang dipakai konsumen. Pihak-pihak yang

berkepentingan pada hidran umum ini yaitu masyarakat/konsumen, pengelola sarana, PDAM Kota Padang, namun tidak terikat oleh suatu instrumen peraturan. Sehingga dimasa yang akan datang, model ini menghendaki adanya kelembagaan di tingkat pemakai yang berkelanjutan yang bisa menjadi mitra pemerintah. Menurut Astuti (2008) kelembagaan hidran merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu berupa air

Keberadaan hidran umum bagi masyarakat miskin adalah untuk masyarakat miskin dan daerah yang rendah akses, dimana daerah rendah akses umumnya adalah daerah yang memang jauh dari sumber air atau sumber yang ada kondisinya sangat buruk sehingga sulit dan membutuhkan usaha yang relatif besar untuk dapat mengolah dan membawa air minum ke masyarakat yang membutuhkan (Bappenas, 2004).

Hasil penelitian Hidayat (2008) menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan hidran umum selama ini ada pada kelembagaan lokal pengguna hidran umum. Kelembagaan yang ada selama ini tidak berjalan sesuai fungsi-fungsinya, ini dapat dilihat akibat yang ditimbulkan yaitu munculnya konflik antar pemakai air, biaya operasi dan pemeliharaan hidran tidak ada dan tidak adanya aturan dan insentif dalam mengelola hidran umum, sehingga terjadi penurunan jumlah hidran umum yang signifikan. Kondisinya, jumlah hidran umum (kran umum dan tangki air) adalah 546 unit, dengan kondisi 287 unit (52,6%) masih aktif dan 259 unit (47,4%) sudah tidak aktif/tidak berfungsi lagi.

Tulisan bertujuan untuk mengurai permasalahan kondisi pengelolaan air bersih hidran umum pada masyarakat miskin di Kota Padang. Pada akhir tulisan ini, penulis mencoba menyumbangkan pola pikir penguatan dan pengembangan kelembagaan lokal dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air bersih hidran umum di Kota Padang. Dan tulisan ini juga diharapkan memberi masukan dalam perencanaan model kelembagaan masyarakat untuk meningkatkan kreatifitas dan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan sosial masyarakat dan pembangunan daerah.

Tulisan ini berpendapat bahwa kelembagaan lokal masyarakat miskin pada hidran umum punya potensi untuk diperkuat dalam meningkatkan akses rumahtangga miskin pada air bersih yang terjamin dalam jangka waktu yang panjang melalui fasilitasi aturan internal secara partisipatif, fasilitasi pengembangan administrasi pengelolaan hidran umum, fasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola hidran umum serta mengembangkan usaha ekonomi berbasis air bersih pada rumah tangga miskin pengguna hidran umum di Kota Padang.

Tulisan ini akan dibagi kedalam tiga bagian. Pada bagian pertama menjelaskan bentuk penyediaan air bersih melalui hidran umum di Kota Padang, pada bagian dua akan diungkapkan fakta penyediaan air bersih hidran umum untuk masyarakat miskin Kota Padang, dan pada bagian terakhir menyampaikan pola pikir penguatan dan pengembangan kelembagaan hidran umum untuk masyarakat miskin di Kota Padang.

Fakta Penyediaan Air Bersih Hidran Umum Untuk Masyarakat Miskin Di Kota Padang

Menurut data resmi Susenas, akses air dapat dikategorikan berdasarkan kepemilikannya: milik pribadi atau umum, individu atau bersama. Data Susenas tersebut menunjukkan bahwa di antara rumah tangga yang memiliki akses air, sebanyak 52% memiliki sumber air bersama (hidran umum). Kebanyakan air yang dipakai di Indonesia tidak diperoleh dari melalui penyaluran. Sebaliknya, mayoritas penduduk Indonesia memperoleh air dengan cara mengambil air bawah tanah. Di daerah perkotaan, hanya 33 % penduduk yang tinggal dalam rumah tangga dengan akses air perpipaan. Pada kelompok penduduk miskin, hanya 18,3 % yang memiliki akses air perpipaan. (World Bank, 2007).

Pasokan air bagi penduduk miskin di daerah perkotaan tidak mudah. Situasi saat ini memperlihatkan adanya perbedaan mencolok antar kota, dan arena itu diperlukan kombinasi solusi untuk masa mendatang. Di daerah perkotaan, tingkat akses pasokan utilitas lebih rendah pada kelompok penduduk miskin, namun pelayanan PDAM untuk seluruh rumah tangga ini juga terbatas. Analisis ini beserta analisis tarif dan biaya sambungan, menunjukkan bahwa jika tersedia pelayanan pipa saluran air, maka kemungkinan penduduk miskin akan dapat mengaksesnya (World Bank, 2007).

Khususnya di Kota Padang, untuk meningkatkan akses rumahtangga miskin terhadap air bersih ini, pemerintah sejak tahun 1970-an telah menyediakan hidran umum dalam bentuk tangki air dan kran umum. Departement Pekerjaan

Umum telah membangun sebanyak 546 kran umum sampai tahun 2005. Penyediaan kran umum ini juga didukung oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang dengan menyediakan pasokan air bersih untuk rumah tangga miskin dengan tarif yang lebih rendah dibanding dengan tarif yang dikenakan pada golongan pelanggan lainnya.

Di Kota Padang pelayanan air bersih perpipaan untuk masyarakat miskin Pada Tahun 2006 adalah 10.374 pelanggan (lebih kurang 6 % dari populasi masyarakat miskin). Artinya, masih banyak penduduk miskin Kota Padang yang belum terlayani oleh air bersih. Dari data yang ada, mereka dilayani dari hidran umum yang kondisinya 287 unit (52,6%) masih aktif dan 259 unit (47,4%) sudah tidak aktif/tidak berfungsi lagi, jadi dengan 287 unit hidran umum telah melayani sekitar 10.374 pelanggan yang masuk masyarakat miskin di Kota Padang.

Hasil penelitian Hidayat (2008), banyaknya hidran umum yang sudah tidak aktif dan tidak berfungsi secara optimal disebabkan karena permasalahan kelembagaan pengguna hidran umum. Permasalahan ini dipicu oleh konflik antar sesama pemakai air, biaya operasi dan pemeliharaan hidran umum yang rendah, tidak adanya aturan dan insentif bagi pengelola, dan pada beberapa lokasi di sebabkan oleh ketidaktersediaan air secara kontiniu setiap harinya (*hours per day*). Karena keadaan yang demikian, banyak pula diantara fasilitas tersebut yang sudah rusak. Keadaan ini mengindikasikan bahwa fasilitas yang dibangun pemerintah bekerjasama dengan PDAM tersebut belum termanfaatkan dengan baik. Sehingga tujuan utama untuk meningkatkan akses

rumahtangga miskin terhadap air bersih di Kota Padang tidak tercapai.

Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan kegiatan untuk kembali menggerakkan masyarakat, terutama masyarakat miskin pengguna hidran umum, untuk mengelola dan memanfaatkan fasilitas hidran umum secara baik, agar mereka dapat memperoleh dan memenuhi kebutuhan pokok pada air bersih secara murah, mudah dan berkelanjutan. Perlu dipahami, permasalahan baik secara fisik infrastruktur, dan sosial-ekonomi yang menyebabkan tidak terbentuk kelembagaan di tingkat pengguna air bersih hidran umum ini.

Permasalahan pengelolaan hidran umum dalam penyediaan air bersih bagi rumahtangga miskin melalui air bersih hidran umum di Kota Padang, dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kendala Akses Rumah Tangga Miskin Pada Air Bersih Melalui Hidran Umum di Kota Padang (Hidayat, 2008).

Gambar 1. Memaparkan persoalan penyediaan air bersih untuk rumahtangga miskin, yakni lemahnya lembaga ditingkat pengguna air. Lemahnya kelembagaan ini menyebabkan tidak adanya aturan yang tegas dalam pengelolaan hidran umum sehingga munculnya konflik sesama pengguna air, tidak adanya pembiayaan sehingga tidak terawatnya fasilitas air bersih serta tidak mengalirnya air pada waktu-waktu tertentu yang indikasi awal menunjukkan disebabkan oleh adanya penyedotan air dengan penggunaan pompa mesin oleh pelanggan sambungan rumah tangga dan industry, sehingga pada akhirnya menyebabkan tujuan utama untuk menyediakan air bersih bagi rumahtangga miskin ini tidak tercapai, kalau pengguna memiliki kelembagaan yang kuat diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Banyaknya hidran umum yang sudah tidak aktif dan tidak berfungsi secara optimal disebabkan karena tidak berfungsinya kelembagaan pengguna hidran umum, sehingga muncul permasalahan konflik antar pemakai air, biaya operasi dan pemeliharaan hidran umum yang rendah, tidak adanya aturan dan insentif bagi pengelola, dan pada beberapa lokasi di sebabkan oleh ketidaktersediaan air secara kontiniu setiap hari (*hours per day*). Karena keadaan yang demikian, banyak pula diantara fasilitas tersebut yang sudah rusak. Keadaan ini mengindikasikan bahwa fasilitas yang dibangun pemerintah bekerjasama dengan PDAM tersebut belum termanfaatkan dengan baik. Sehingga tujuan utama untuk meningkatkan akses rumahtangga miskin terhdap air bersih di Kota Padang tidak tercapai.

Sehingga salah satu target penting yang mesti dicapai dalam Millennium Development Goals (MDGs) adalah keterjangkauan penduduk miskin pada air bersih masih jauh dari harapan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan akses rumahtangga miskin pada air bersih ini. Di perkotaan Indonesia, pemerintah menyediakan infrastruktur seperti hidran umum yang ditujukan bagi rumahtangga miskin. Namun, hasil penelitian menemukan bahwa pelayanan yang disediakan pihak Pemerintah belum dapat dinikmati secara baik dan berkelanjutan oleh masyarakat miskin di Kota Padang (Hidayat, 2008).

Pola Pikir Penguatan Dan Pengembangan Kelembagaan Hidran Umum Di Kota Padang

Berbagai macam perdebat mengenai apakah penyediaan air bersih perkotaan diserahkan ke pihak swasta atau tidak telah berkembang luas. Bagi yang mendukung, menyebutkan bahwa pihak swasta dapat menyediakan air dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan dengan itu dapat menjangkau rumahtangga miskin (Dore *et al.*, 2004; Lee and Floris, 2003), sementara pihak yang menentang menyampaikan argumen bahwa swastanisasi air, terutama air minum, akan membatasi akses rumahtangga miskin pada air bersih yang merupakan hak hidup masyarakat, karena rendahnya kemampuan beli. Swasta memberikan perhatian supply air minum kepada masyarakat golongan menengah-atas (Bakker, 2007; Castro, 2007).

Namun hasil penelitian di beberapa belahan dunia menunjukkan baik pemerintah maupun swasta, yang apabila tidak memiliki arrangement kelembagaan yang kuat, gagal dalam

menyediakan air bersih bagi rumahtangga miskin (Bakker *et al.*, 2008; Fernández-Maldonado, 2008; Gutierrez, 2007).

Merujuk kepada pendapat Bakker (2008), Fernandez (2008), Gutierrez (2007), yaitu apabila tidak memiliki arrangement kelembagaan yang kuat maka penyediaan air bersih bagi rumah tangga miskin akan gagal. Pendapat tersebut sejalan dengan fakta penyediaan air bersih melalui hidran umum di Kota Padang yang diperuntukan bagi masyarakat miskin. Selama ini peningkatan akses rumahtangga miskin pada air bersih yang lebih menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur fisik dan mengabaikan aspek sosial-ekonomi dan kelembagaan masyarakat. Kegagalan dalam meningkatkan akses, walau infrastruktur fisik telah dibangun, mengindikasikan perlunya mengintegrasikan persoalan terakhir ini dalam perencanaan peningkatan akses pada air bersih bagi rumahtangga miskin.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesian bahwa sasaran kebijakan penyelenggaraan air bersih tersebut ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu, i). Peningkatan akses, ii). Penggunaan yang efektif, dan iii). Menjamin keberlanjutan (Bappenas, 2004).

Bertolak dari fakta permasalahan penyediaan air bersih melalui hidran umum di Kota Padang, maka yang harus dilakukan adalah intervensi dan fasilitasi untuk memperkuat kelembagaan pengelola air bersih ini supaya bisa menjamin keberlanjutan dan meningkatkan nilai manfaat dari hidran umum tersebut.

Pola pikir penguatan dan pengembangan kelembagaan pengguna

air bersih hidran umum di Kota Padang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Pola Pikir Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Hidran Umum di Kota Padang.

Gambar 2. Memaparkan 2 (dua) pilar penguatan dan pengembangan kelembagaan hidran umum di Kota Padang, *pertama* adalah usaha untuk meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap air bersih, dan yang *kedua* adalah mengembangkan usaha ekonomi berbasis air bagi rumah tangga miskin yang mendapat layanan air bersih hidran umum dari PDAM Kota Padang.

Pada kedua pilar tersebut pemerintah harus ikutserta karena merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 40. Dan untuk mendukung pelaksanaan amanah Undang-Undang tersebut maka pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum. Konsekuensinya, sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini adalah menjadi tantangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan dan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat diwilayahnya. Wewenang dan tanggungjawab pemerintahan kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan dalam sistem penyediaan air minum adalah sesuai PP 16 Tahun 2006 pasal 40 adalah pemerintah daerah harus memberi bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai dengan kewenangannya.

Pilar pertama dalam usaha dalam meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap air bersih dari hidran umum, dapat dilakukan dengan pembentukan kembali dan penguatan

kelembagaan, membangun jaringan kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan dengan PDAM Kota Padang, serta upaya perbaikan fasilitas hidran umum tersebut.

Kegiatan untuk meningkatkan akses rumah tangga miskin pada air bersih, yang dapat dilakukan pada tahap pembentukan kembali dan penguatan kelembagaan hidran umum adalah memfasilitasi penyusunan aturan internal secara partisipatif, memfasilitasi kegiatan pengelolaan administrasi, dan memfasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang mengelola hidran umum. Dan Setelah terbangunnya kelembagaan yang kuat pada pengguna hidran umum maka diharapkan pengelolaan air bersih hidran umum yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Pada tahap membangun jaringan kelembagaan dengan PDAM Kota Padang adalah untuk membangun komunikasi “dua arah” antara kelompok pengguna hidran umum dengan pihak PDAM Kota Padang sebagai penyedia dan pemasok air bersih pada hidran umum di Kota Padang, sehingga pengguna hidran umum yang melembaga bisa membangun jaringan kemitraan dengan PDAM Kota Padang.

Pada tahap upaya perbaikan fasilitas hidran umum, yang harus dilakukan adalah memfasilitasi perbaikan hidran umum secara partisipatif dengan menggunakan swadaya masyarakat itu sendiri.

Pilar kedua, mengembangkan usaha ekonomi berbasis air bersih bagi rumah tangga miskin pelanggan hidran umum. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyeleksi usaha ekonomi berbasis air bersih yang masyarakat mau dan mampu untuk mereka lakukan. Setelah jenis usaha ekonomi berbasis air tersebut

terseleksi, maka pemerintah atau pihak terkait harus melakukan pelatihan teknis dan manajemen usaha, bantuan awal pengembangan usaha dan penyediaan fasilitas terkait dengan jenis usaha yang dilakukan.

Dengan telah memberikan beberapa bantuan tersebut, pemerintah atau pihak terkait harus membangun dan mengembangkan jaringan pasar supaya usaha ekonomi tersebut dapat berkelanjutan, sehingga dampak dari usaha ekonomi berbasis air bersih pada pelanggan hidran umum ini dapat meningkatkan taraf hidup pelanggan hidran umum. Dengan taraf hidup yang sudah meningkat diharapkan dapat pelanggan hidran umum dapat pengelolaan hidran umum dalam jangka waktu panjang.

Penguatan kelembagaan ditandai adanya organisasi yang mengatur diri sendiri dan lebih terdistribusi, yang menandai unit-unit lokal yang mengelola diri sendiri, yang berinteraksi satu sama lain guna memberikan umpan balik pelaksanaan yang cepat dan kaya kepada semua tingkat organisasi yang membantu tindakan koreksi diri. Dengan demikian keseimbangan yang lebih baik antara struktur vertikal dan horisontal dapat diwujudkan (Korten, 1983).

Untuk itu, dalam pemenuhan kebutuhan air bersih melalui hidran umum bagi rumah tangga miskin di Kota Padang harus didukung dengan berjalanya fungsi dan peran aktif ditengah lembaga pengguna hidran umum. Peran aktif rumah tangga miskin dan lembaga pengelola hidran umum juga harus didukung oleh pemerintah daerah yang tidak hanya berkewajiban dalam menyelesaikan persoalan air bersih dalam memenuhi ketentuan kualitas, kuantitas dan kontinuitas untuk seluruh masyarakat,

khususnya untuk rumah tangga yang selama ini sudah mendapat akses air bersih dengan model penyediaan hidran umum yang tergolong rumah tangga miskin, namun juga harus memperhatikan keberlanjutan kelembagaan pelanggan hidran umum yang akan bertanggungjawab dalam mengelola hidran umum dikelompoknya. Selama ini pengelolaan hidran umum hanya dilakukan oleh seorang coordinator hidran umum dengan berbagai macam persoalan, mulai dari mengelola anggota sampai pada membayarkan tagihan hidran umum pada loket-loket pembayaran tagihan PDAM.

Acknowledgement

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan masukan dalam penulisan paper terhadap staf-staf peneliti di Pusat Studi Irigasi, Sumberdaya Air, Lahan dan Pembangunan Universitas Andalas.

DAFTAR PUSTAKA

- [10.22202/economica.2016.v5.i1.1070](https://doi.org/10.22202/economica.2016.v5.i1.1070)
 Astuti, n. D. W. I. (2008). *Penguatan kelembagaan pengelolaan air*, 1–125.
- Bappenas. 2004. *Penyelenggaraan Air Minum Dan Kesehatan Lingkungan Berbasis Lembaga*. Jakarta.
- Bappenas. 2003. *Pembangunan Air Minum Dan Kesehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat*. Jakarta.
- Bakker, K. 2007. *Trickle Down? Private sector participation and the pro-poor water supply debate in Jakarta, Indonesia*. *Geoforum*, 38(5), 855-868.
- Bakker, K., Kooy, M., Shofiani, N. E., & Martijn, E.-J. (2008).

- Governance Failure: Rethinking the Institutional Dimensions of Urban Water Supply to Poor Households. World Development, 36(10), 1891-1915.*
- Castro, J. E. (2007). *Poverty and citizenship: Sociological perspectives on water services and public-private participation. Geoforum, 38(5), 756-771.*
- Dore, M. H. I., ner, J., & Zumer, K. (2004). *Privatization of water in the UK and France—What can we learn? Utilities Policy, 12, 41-50.*
- Fernández-Maldonado, A. M. (2008). *Expanding networks for the urban poor: Water and telecommunications services in Lima, Peru. Geoforum, 39(6), 1884-1896.*
- Gutierrez, E. (2007). *Delivering pro-poor water and sanitation services: The technical and political challenges in Malawi and Zambia. Geoforum, 38(5), 886-900.*
- Hidayat, Rian. 2008. *Analisis Faktor Penentu Kepuasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Wilayah Rendah Akses Atas Pelayanan PDAM Kota Padang.* Universitas Negeri Padang. Padang.
- Korten, David C. 1983. *People-Contered Development: Reflections on Development Theory and Method.* Manila: mimeograph.
- Lee, T., & Floris, V. (2003). *Universal access to water and sanitation: Why the private sector must participate. Natural Resources Forum, 27(4), 279-290.*
- Work Bank Office Jakarta. 2007. *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.* PT. Graha Info Kreasi. Jakarta.